

IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Natalia Vera

ABSTRAK

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan program ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif teknik Pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi Program Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang baru beroperasi, kurang optimal dan masih perlu banyak dibenahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur kurang optimal karena yang pertama Kondisi Dinas Ketahanan Pangan yang belum efektif dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, Program Lumbung Pangan yang di program masih mengalami kendala, seperti kurang aktifnya lumbung pangan karena kurangnya dana operasional program. Ketiga, Program toko tani sebagai pasar penyeimbang belum berjalan secara optimal karena di lapangan ditemukan oleh peneliti tempat toko tani belum memiliki tempat khusus, sehingga masih menggunakan rumah pribadi milik PPL serta ditambah dengan sikap masyarakat yang tidak mau tau dengan keberadaan Toko Tani tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Ketahanan Pangan

PENDAHULUAN

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin, Hal ini untuk menjaga agar kegiatan pembangunan di daerah tetap konsisten dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional (PP Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan). Ketahanan pangan di suatu daerah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut undang-Undang PP No 17 Tahun 2015 tentang pangan, pemerintah memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan. Dinas Badan Ketahanan Pangan

yaitu Dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 ketahanan Pangan terdiri dari ketersediaan pangan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur meningkatkan kemandirian pangan dan pengembangan cadangan pangan berdasarkan PP No 17 Tahun 2015 dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis sumber daya lokal menuju kemandirian pangan Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur meningkatkan program pengembangan cadangan pangan daerah yaitu dengan pembuatan lumbung pangan di setiap kecamatan dan pendirian Toko Tani Indonesia.

Di Kotawaringin Timur terdapat 17 kecamatan dan 162 Desa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah penduduk pada akhir tahun 2016 sebanyak 436.276 jiwa, dengan banyaknya jumlah penduduk di kotawaringin timur maka tingkat konsumsi di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga sangat meningkat namun dari ketersediaan bahan pangan masih kurang sementara kebutuhan konsumsi pangan terutama untuk jenis beras, cabai, bawang, daging dan lauk pauk selalu meningkat sedangkan hasil produksi lokal hanya untuk memenuhi 50% kebutuhan masyarakat sisanya dipenuhi dengan pemasukan dari daerah lain hal ini lah yang membuat harga melonjak tinggi karena minimnya hasil panen pertanian lokal juga peternakan dan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih kurangnya pengawasan dari dinas terkait serta masih kurangnya pengetahuan dari petani dan pedagang tentang bahayanya zat-zat pengawet dan lain-lain sehingga masih banyak beredar makanan yang tidak sehat konsumsi seperti berbahan pengawet, jajanan yang berbahan kimia dan lain-lain sehingga tidak sehat untuk di konsumsi.

Selain permasalahan di atas, terdapat permasalahan lain yakni penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah dan masih Kurangnya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan cadangan pangan lokal serta tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras. Berdasarkan penjelasan Latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah **“Implementasi Ketahanan Pangan Di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.”**

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (James E. Anderson, 1979:3). Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :

1. Merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan.
2. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.
3. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu;

4. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa (otoratif).

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Diseminasi kebijakan ada empat, yakni:

- 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang;
- 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;
- 3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah;
- 4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Menurut Edwards III (1980: 9-11), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Ini berarti bahwa kebijakan publik tidak akan efektif dalam pelaksanaannya apabila tidak didukung oleh keempat faktor di atas. Variabel-Variabel tersebut, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran (target group).

b. Sumberdaya

Dalam Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, material dan modal. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor

kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa Sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

c. Disposisi

Suatu Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. (Moleong 2014:6). Dipilihnya metode penelitian ini didasarkan pada keinginan peneliti untuk menemukan, memahami dan mendeskripsikan secara mendalam tentang bagaimana Implementasi peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi dari Teori George C. Edwards III (1980). Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* menurut pandangan Edwards III Implementasi kebijakan di pengaruhi empat variabel, yakni:

1. Komunikasi

Berdasarkan data lapangan, komunikasi sudah dilakukan antara setiap SKPD yang terkait guna tercapainya keberhasilan dalam pengimplementasian program ketahanan yaitu cadangan pangan lokal dan hasil wawancara diatas komunikasi antara pembuat kebijakan yaitu dinas Ketahanan Pangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pihak instansi-instansi yang terkait berjalan sesuai aturan dan tugas masing-masing dalam melaksanakan

implementasi program ketahanan pangan sehingga sampai saat ini berjalan dengan baik dalam melaksanakan implementasi tentang program ketahanan pangan sesuai dengan Undang-undang No 17 tahun 2015 dalam kegiatan kerjasama, sosialisasi, diskusi yang telah dijalankan. Namun karena kondisi dinas ketahanan pangan yang masih baru maka masih banyak program Dinas Ketahanan Pangan yang belum efektif secara optimal.

2. Sumber Daya

Berkaitan dengan sumber daya manusia pegawai serta satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah cukup baik hanya untuk masyarakat petani itu masih kurang memadai dan untuk sumber daya anggaran untuk menjalankan program ketahanan pangan masih kurang, sehingga untuk melaksanakan kebijakan program tidak berjalan efektif dan efisien.

3. Disposisi

Dalam variabel ketiga yaitu disposisi, dimana dalam disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan haruslah bersikap bertanggung jawab, komitmen, jujur dalam mengimplementasikan kebijakan dalam hal program Ketahanan Pangan. Maka dari itu pelaksana harus memiliki disposisi yang baik juga agar dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik sesuai dengan apa di inginkan sehingga tidak terjadi penyimpangan dari setiap program yang dilaksanakan.

4. Struktur Birokrasi

Variabel ke empat untuk struktur birokrasi mempunyai dua indikator yaitu yang pertama SOP (*Standar Operating Procedures*) dimana implementor melaksanakan program ketahanan pangan yaitu implementasi Ketahanan Pangan kemudian indikator kedua yaitu upaya penyebaran tanggung jawab antar unit kerja karena sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi Ketahanan Pangan di dinas ketahanan pangan kotawaringin timur yaitu: bersifat mendukung dan penghambat. Faktor Pendukung dalam implementasinya adalah Perluasan areal Pertanian. Sementara itu hal yang bersifat menghambat implementasi program ini adalah anggaran dana, alih fungsi lahan, prasarana dan sarana.

PEMBAHASAN

Model Implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III ada 4 Variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yakni:

1. Komunikasi

Untuk implementasi program ketahanan pangan, implementor dari Dinas Ketahanan Pangan selama kurang lebih dua tahun ini beroperasi cukup baik dan Komunikasi Internal antara pegawai di setiap bidang di Dinas Ketahanan Pangan sudah terkoordinasi dengan baik namun Komunikasi eksternal antara Dinas Ketahanan Pangan dengan kelompok sasaran yaitu masyarakat kurang berjalan dengan baik karena kendala yang ditemukan dilapangan adalah ada beberapa masyarakat tidak respon dan apatis terhadap masalah pangan mereka hanya banyak mengeluhkan dengan harga pangan yang selalu melonjak naik dan para petani tidak tau guna dan fungsi dari lumbung pangan yang di sediakan di

setiap kecamatan, dan kendala selanjutnya masyarakat sekitar tidak mau tau dengan keberadaan toko tani yang sudah ada karena barang yang dijual di toko tani tidak bervariasi, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui toko tani, ini fakta dilapangan yang peneliti dapatkan.

2. Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Timur sumber daya manusia di Dinas Ketahanan Pangan sudah cukup baik, namun karena Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih baru sehingga karyawan disini hanya 19 orang pegawai dan dari segi sumber daya anggaran masih kurang memadai. Di lapangan yang peneliti temukan juga untuk sumberdaya masyarakat petani di Kabupaten Kotawaringin Timur masih kurang memadai. Selanjutnya untuk sumber daya informasi sudah cukup memadai karena dari Dinas Ketahanan Pangan adanya Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dapat di akses di situs Dinas Ketahanan Pangan secara online dan bebas sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi yang jelas. Hanya saja karena kondisi Dinas Ketahanan Pangan yang masih belum efektif.

3. Disposisi

Implementor di Dinas Ketahanan Pangan dalam Mengimplementasikan Program Ketahanan Pangan cukup baik karena walaupun masih tergolong baru beroperasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti yang telah ditetapkan di undang-undang. Selanjutnya di masyarakat Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan fungsinya selalu bersikap profesional dan mendukung segala kegiatan dari para petani dalam menciptakan Kemandirian Pangan dengan hasil dari pertanian yang banyak maka untuk pembuatan Lumbung Pangan di setiap kecamatan dapat terlaksana sehingga apabila semuanya dapat terlaksana maka dengan demikian Kabupaten Kotawaringin Timur akan dapat menghasilkan swasembada beras dan mampu memenuhi Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan tidak impor lagi. Dapat di simpulkan dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan disposisi dari Dinas Ketahanan Pangan Sudah dilakukan dengan cukup baik.

4. Struktur Birokrasi

SOP dalam mengimplementasikan Program Ketahanan Pangan Di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah menjalankan sesuai dengan arahan-arahan yang diberikan oleh pimpinan dalam ketentuan-ketentuannya berdasarkan SOP Hal ini sesuai dengan dokumen yang peneliti temukan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tugas pokok adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi. Dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan yang peneliti temukan di lapangan SOP Dinas Ketahanan Pangan sudah ada dan mempunyai Petunjuk Teknis (Juknis).

Adapun Faktor Pendukung Dalam mengimplemntasikan program Ketahanan Pangan Bidang Ketersediaan Pangan Di Dinas Ketahanan Pangan dari hasil wawancara peneliti adalah adanya perluasan areal pertanian areal tanam

yakni cetak sawah baru 200 hektar, yakni di Lempuyang 100 hektare bekerja sama dengan TNI, kemudian di kecamatan mentaya hulu 50 hektare dan Telaga Antang 50 hektare yang membuat makin banyaknya lokasi pertanian di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan dalam implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi penghambat yaitu:

1. Anggaran Dana

Anggaran dana pemerintah pusat daerah dalam menganggarkan dana untuk pelaksanaan program ketahanan pangan seperti pembuatan lumbung pangan dan pendirian toko tani masih kurang sehingga selama Dinas Ketahanan Pangan beroperasi Kebijakan program dari Dinas Ketahanan Pangan masih belum terlaksana dengan baik karena masih memerlukan anggaran dana yang besar.

2. Alih Fungsi Lahan

Karena pemerintah belum bisa menjamin kesejahteraan para petani di Kabupaten Kotawaringin Timur dan tidak adanya subsidi harga gabah serta alat yang canggih untuk membantu para petani maka banyak para petani yang beralih menanam sawit dan menjual lahannya untuk pembangunan.

3. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang masih kurang dalam melaksanakan program ketahanan pangan seperti tempat/ lokasi masih kurang, serta peralatan yang modern yang dapat menunjang kinerja Dinas Ketahanan pangan karena kondisi Dinas Ketahanan Pangan yang belum efektif sehingga berdampak terhadap ketahanan pangan.

KESIMPULAN

Implementasi program ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum optimal hal tersebut di karenakan pertama, Kondisi Dinas Ketahanan Pangan yang belum efektif dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, Program Lumbung Pangan yang di program masih mengalami kendala, seperti kurang aktifnya lumbung pangan karena kurangnya dana operasional program. Ketiga, Program Toko Tani sebagai Pasar penyeimbang belum berjalan secara optimal karena di lapangan ditemukan oleh peneliti, Toko Tani belum memiliki Tempat Khusus, masih menggunakan Rumah pribadi milik PPL serta sikap masyarakat yang tidak mau tau dengan adanya toko tani tersebut, hal tersebut di sebabkan, barang-barang di toko tani selain tidak variatif, jumlahnya yang sedikit sehingga membuat toko tani kurang di minati oleh masyarakat sekitar, selain itu masih banyak petani yang menjual hasil pertanian kepada tengkulak di bandingkan kepada pemerintah, sehingga mengakibatkan permainan harga di pasar yang lebih banyak menguntungkan para tengkulak di bandingkan para petani.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur yakni faktor pendukung : yaitu adanya perluasan daerah pertanian, adanya situs web online tentang ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, kerjasama yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Terkait, dan adanya SOP (*Standard Operating Procedures*). Adapun faktor yang menjadi penghambat

dalam implementasi kebijakan yakni : seperti anggaran dana yang sedikit dari pemerintah, masih kurangnya sarana dan prasarana karena kondisi dinas yang belum efektif, sehingga membuat hasil kinerja Dinas Ketahanan Pangan Belum Optimal.

SARAN

Menganggarkan kembali dana untuk setiap program yang dijalankan oleh dinas-dinas agar program-program dapat terlaksana dengan baik. Dalam upaya mewujudkan program ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur agar hasilnya dapat efektif dan efisien. Menyediakan tempat khusus untuk pelaksanaan Toko Tani Indonesia agar dapat menjadi pasar penyeimbang yang efektif, sehingga harga dapat di pantau dengan baik dan dapat mengurangi lonjakan harga pangan yang selama ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badan Ketahanan Pangan. 2006. *Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan. Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan*. Jakarta: Departemen Pertanian Jayawinata.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Hadinoto, Suryono. 2011. *Analisi Dampak Kependudukan terhadap ketahanan Pangan*. Bogor : Bkkbn
<https://www.google.com/analisis> Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotim 2015
<https://www.google.com/Analisis> Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotim 2017
- Imam Suprayoga, Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama cct 1*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Meleong, J. Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nainggolan, Kaman. 2008. "Ketahanan dan Stabilitas Pasokan, Permintaan dan Harga Komoditas Pangan". *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 6 No. 2 bulan Juni 2008. Hal. 114 – 139.
- P. Sondang, Siagian. 1985. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

- Rhama, B. (2020). The meta-analysis of Ecotourism in National Parks. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1), 1-17.
- Rhama, B. (2019). *Taman Nasional dan Ekowisata*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Rhama, B. and Reindrawati, D. Y. (2019). Geotour Guide Competency in the Context of Safety Management. *Opción*, 35(24), 885-899. .
- Rhama, B. (2019). Psychological Costs on Tourism Destination. *Journal of Advanced Management Science*, 7(3), 100-106. doi: 10.18178/joams.7.3.100-106
- Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan Based on Ecotourism Policy Perspective. *Policy & Governance Review*, 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
- Rhama, B. (2014). Hubungan Antara Nilai Yang Dimiliki Stakeholder Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. *JISPAR*, 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH
- Rhama, B. (2013). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Kalimantan Tengah. *JISPAR*, 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
- Rhama, B. (2012). Kebijakan Publik Untuk Ekowisata di Kalimantan Tengah: Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. *JISPAR*, 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U
- Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan
- Undang-undang Pergub Kotim No 37 tahun 2016 Tentang susunan organisasi dan rincian tugas pokok, fungsi serta uraian tugas dinas ketahanan pangan kabupaten kotawaringin timur
- Undang-undang PP No 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan
www.Borneonews.co.id (02/02/18)
www.kebijakankesehatan.co.cc/2009/09/Pengertian-Kebijakan.html